

Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Konsumsi dan Investasi: Perspektif Keynesian dan *Real Business Cycle*

Annisa Fitri^{1*)}, Estu Sri Luhur², Devi Agustia³, Annisa Alifa Ramadhani⁴

¹Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 35141, Indonesia

²Balai besar riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan, Jakarta Utara, 14430, Indonesia

³Agribisnis, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, 23615, Indonesia

⁴Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta, Depok 16425, Indonesia

*)Corresponding Author: annisafitrihasibuan@polinela.ac.id

[Accepted 03-06-2025: Revision 10-08-2025: Published 29-08-2025]

Abstract

The uncertainty of the global economy and the limited effectiveness of monetary policy have raised concerns about how far fiscal policy—particularly government spending—can effectively stimulate household consumption and private investment. This study aims to analyze the impact of government expenditure on consumption and investment in Indonesia from the perspectives of Keynesian theory and the Real Business Cycle (RBC) model. Using a descriptive-comparative quantitative approach, the study draws on secondary data from the Central Bureau of Statistics and the Ministry of Finance covering the period 2020–2023. The findings indicate that from a Keynesian perspective, increased government spending tends to boost consumption and aggregate demand, although it may reduce private investment due to the crowding-out effect. In contrast, the RBC model views government expenditure as reducing consumption due to future tax expectations, while potentially increasing long-term investment through improved productivity and capital accumulation. The study highlights the importance of selecting the appropriate theoretical framework in fiscal policy design to ensure its optimal impact on national economic performance.

Keywords: investment, consumption, RBC model, government expenditure, Keynesian theory

Abstrak

Ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan efektivitas kebijakan moneter menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan fiskal, khususnya pengeluaran pemerintah, mampu mendorong konsumsi dan investasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi swasta di Indonesia dalam perspektif teori Keynesian dan model *Real Business Cycle* (RBC). Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif, studi ini memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan untuk periode 2020–2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pendekatan Keynesian, peningkatan belanja pemerintah cenderung berdampak positif terhadap konsumsi dan permintaan agregat, meskipun berpotensi menurunkan investasi akibat efek crowding out. Sebaliknya, dalam perspektif RBC, pengeluaran pemerintah dipandang dapat mengurangi konsumsi karena ekspektasi kenaikan pajak di masa depan, tetapi justru mendorong peningkatan investasi jangka panjang akibat pertumbuhan produktivitas dan kapital. Studi ini menggarisbawahi pentingnya pemilihan pendekatan teoritik yang tepat dalam merancang kebijakan fiskal agar dampaknya terhadap perekonomian lebih optimal.

Kata kunci: investasi, konsumsi, model RBC, pengeluaran pemerintah, teori Keynesian

Pendahuluan

Krisis ekonomi global yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak selalu memberikan hasil yang optimal dalam merespons ketidakstabilan makroekonomi. Situasi ini mendorong perhatian para ekonom dan pembuat kebijakan untuk kembali meninjau peran kebijakan fiskal sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang strategis. Sejak dekade 1960-an, kebijakan fiskal mulai banyak diterapkan secara aktif, khususnya oleh negara-negara maju, sebagai respons terhadap berbagai krisis ekonomi, termasuk resesi global. Pengeluaran pemerintah menjadi salah satu instrumen penting yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi nasional (Agnello et al., 2013; Gondor & Ozpençe, 2014).

Pandemi Covid-19 berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkontraksi 2,1%, pengangguran meningkat 1,9%, dan kemiskinan meningkat 1% sepanjang tahun 2020 (Ridhwan et al., 2021).. Pandemi Covid-19 telah memaksa berbagai negara melakukan kebijakan fiskal ekspansif, termasuk Indonesia. Melalui PERPPU No. 1/2020, defisit anggaran APBN 2020 melonjak dari Rp307 triliun (1,76% dari PDB) menjadi Rp853 triliun (5,07% dari PDB) dengan pembiayaan utang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun. Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk mendukung program penanganan COVID-19. Belanja bantuan sosial mengalami peningkatan signifikan, sedangkan belanja modal mengalami perlambatan akibat prioritas pada sektor kesehatan dan sosial.

Postur APBN Indonesia setelah pandemi Covid-19 mengalami perubahan yang signifikan dengan prinsip pelebaran defisit, peningkatan pembiayaan utang, penurunan *tax ratio*, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan utang ini memberikan tantangan berupa lonjakan rasio utang terhadap PDB dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah (Indrawati et al., 2024; Worldbank, 2020). Studi terkait menunjukkan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia dan kesejahteraan keluarga, meskipun dampaknya bervariasi antar wilayah dan kelompok masyarakat (Hadiyanto et al., 2022). Efektivitas kebijakan fiskal tidak bersifat universal dan sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan kelembagaan masing-masing negara. Penerapan kebijakan fiskal yang tidak disertai dengan stabilitas politik dan sistem kelembagaan yang baik dapat mengurangi efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dalam perbandingan antara kebijakan fiskal Rumania yang tidak berhasil memulihkan perekonomian pascakrisis utang luar negeri pada tahun 2010, dan kebijakan fiskal Turki yang justru menunjukkan keberhasilan yang lebih signifikan dalam krisis nilai tukar dan utang tahun 2018 (Alcantar-Toledo & Venieris, 2014).

Secara teoritis, terdapat dua pendekatan utama yang menjadi rujukan dalam menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, yaitu pendekatan Keynesian dan model RBC. Menurut teori Keynesian, peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan agregat, yang berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga, meskipun berisiko menurunkan investasi akibat efek *crowding out* (Dornbusch et al., 2001). Sebaliknya, pendekatan RBC memandang bahwa pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat mengurangi konsumsi karena masyarakat memperkirakan adanya kenaikan pajak di masa mendatang, namun dapat mendorong investasi karena

meningkatnya akumulasi kapital dan produktivitas (Edelberg et al, 1998). Perbedaan sudut pandang ini menimbulkan kebutuhan untuk melakukan verifikasi empiris, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. (Tagkalakis, 2008) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak ekspansif terhadap konsumsi dalam berbagai kondisi siklus ekonomi, yang bertentangan dengan prediksi RBC. Sebaliknya, Edelberg et al, (1998) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di Amerika Serikat justru mengakibatkan penurunan konsumsi, namun meningkatkan investasi dan output, sejalan dengan pandangan neoklasik. Ketidakkonsistenan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh belanja pemerintah terhadap konsumsi dan investasi sangat bergantung pada konteks negara yang dikaji. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh belanja pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi swasta di Indonesia dengan merujuk pada pendekatan teori Keynesian dan model RBC.

Metodologi

Partisipan

Penelitian ini merupakan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dan komparatif yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi rumah tangga dan investasi swasta dalam perspektif teori Keynesian dan model RBC. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, seperti publikasi BPS, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta laporan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pengukuran

Data yang dianalisis mencakup periode tahun 2020 hingga 2023 dan terdiri atas informasi mengenai belanja modal, belanja selain modal, konsumsi rumah tangga, dan nilai investasi swasta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan mengakses dan mengompilasi data yang telah dipublikasikan secara terbuka oleh instansi pemerintah.

Tabel 1. Jenis dan sumber data

Variabel	Definisi	Satuan	Sumber
Belanja Modal	Pengeluaran pemerintah untuk pembelian aset tetap dan investasi fisik	Rp	APBN, Kemenkeu
Belanja Nonmodal	Pengeluaran pemerintah untuk keperluan operasional dan belanja rutin	Rp	APBN, Kemenkeu
Konsumsi Rumah Tangga	Nilai total konsumsi oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian	Rp	BPS

Investasi Swasta	Nilai investasi yang dilakukan oleh sektor swasta di berbagai sektor	Rp	BPS
------------------	--	----	-----

Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif teoritik yang didasarkan pada model makroekonomi Keynesian dan model RBC. Analisis dilakukan dengan menelaah pengaruh pengeluaran pemerintah (G) terhadap konsumsi rumah tangga (C) dan investasi swasta (I) dalam kerangka teoritik masing-masing. Analisis difokuskan pada periode tahun 2020-2023 dengan melihat kondisi ekonomi pascapandemi Covid-19.

1. Model Keynesian

Model Keynesian menekankan peran belanja pemerintah dalam mendorong permintaan agregat. Model Keynesian menyatakan bahwa dalam jangka pendek, output nasional dan kesempatan kerja utamanya ditentukan oleh permintaan agregat. Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peran dari pemerintah sangatlah penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi (Aruan et al, 2023). Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional (Y) ditentukan oleh:

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad (1)$$

Dengan mengasumsikan perekonomian tertutup (tanpa perdagangan internasional), maka:

$$Y = C + I + G \quad (2)$$

Konsumsi (C) dalam model Keynesian dirumuskan sebagai:

$$C = a + b(Y - T) \quad (3)$$

Dimana:

- a : konsumsi otonom,
- b : *marginal propensity to consume (MPC)*,
- T : pajak

Pengaruh belanja pemerintah terhadap output (Y) dianalisis melalui *multiplier* Keynesian:

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1}{1-b} \quad (4)$$

Model ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah (G) akan meningkatkan pendapatan nasional dan konsumsi secara proporsional, namun juga dapat mengurangi investasi akibat naiknya suku bunga (efek *crowding out*).

2. Model RBC

Dalam model RBC, keputusan konsumsi dan investasi didasarkan pada pilihan antartempo dan reaksi terhadap *shock* produktivitas, serta memperhitungkan pengaruh ekspektasi terhadap masa depan. Fungsi utilitas rumah tangga adalah:

$$C_t + I_t + G_t = Y_t = F(K_t, L_t, A_t) \quad (5)$$

Dimana:

- C_t : konsumsi
- I_t : investasi
- G_t : pengeluaran pemerintah
- Y_t : output total
- K_t : kapital
- A_t : tingkat teknologi (*shock* produktivitas)
- β : faktor diskonto

Dalam kondisi *Ricardian Equivalence*, pembiayaan defisit pemerintah melalui utang tidak mempengaruhi konsumsi secara langsung, karena rumah tangga mengantisipasi adanya pajak di masa depan. Sehingga, peningkatan G_t diasumsikan tidak mempengaruhi konsumsi secara signifikan, tetapi dapat memicu peningkatan tenaga kerja dan kapital sehingga mendorong investasi dan output dalam jangka panjang:

$$\frac{\partial I}{\partial G} > 0, \frac{\partial C}{\partial G} \leq 0 \quad (6)$$

Dengan membandingkan kedua model ini dan mencocokkannya dengan tren data pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun 2020–2023, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara belanja pemerintah, konsumsi, dan investasi yang paling sesuai dengan realitas ekonomi nasional.

Hasil

Tabel 2. Belanja modal dan belanja selain modal Indonesia tahun 2020-2023

Tahun	Belanja Modal (Rp Triliun)	Rincian Belanja Modal	Belanja Selain Modal (Rp Triliun)	Rincian Belanja Modal
2020	206,1	Infrastruktur: Rp 125,4 triliun Peralatan dan Mesin: Rp 56,2 triliun Tanah dan Bangunan: Rp 24,5 triliun	1.656,6	Belanja Pegawai: Rp 368,4 triliun Belanja Barang dan Jasa: Rp 346,6 triliun Belanja Subsidi: Rp 196,2 triliun Belanja Sosial: Rp 101,5 triliun Belanja Hibah: Rp 28,9 triliun Belanja Lainnya: Rp 615 triliun
2021	221,4	Infrastruktur: Rp 130,0 triliun Peralatan dan Mesin: Rp 60,0 triliun Tanah dan Bangunan: Rp 31,4 triliun	1.684,50	Belanja Pegawai: Rp 394,1 triliun Belanja Barang dan Jasa: Rp 362,7 triliun Belanja Subsidi: Rp 210,4 triliun Belanja Sosial: Rp 108,2 triliun Belanja Hibah: Rp 30,1 triliun

2022	233,8	Infrastruktur: Rp 135,0 triliun Peralatan dan Mesin: Rp 65,0 triliun Tanah dan Bangunan: Rp 33,8 triliun	1.765,60	Belanja Lainnya: Rp 578,9 triliun Belanja Pegawai: Rp 421,1 triliun Belanja Barang dan Jasa: Rp 379,8 triliun Belanja Subsidi: Rp 224,6 triliun Belanja Sosial: Rp 115,2 triliun Belanja Hibah: Rp 31,6 triliun Belanja Lainnya: Rp 593,3 triliun
2023	209,2	Infrastruktur: Rp 120,0 triliun Peralatan dan Mesin: Rp 54,0 triliun Tanah dan Bangunan: Rp 35,2 triliun	2.246,50	Belanja Pegawai: Rp 442,5 triliun Belanja Barang dan Jasa: Rp 376,9 triliun Belanja Subsidi: Rp 238,5 triliun Belanja Sosial: Rp 121,3 triliun Belanja Hibah: Rp 33,0 triliun Belanja Lainnya: Rp 617,3 triliun

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023) dan Kementerian Keuangan (2023a)

Hasil penelitian mencakup dua dimensi utama, yaitu temuan teoritis terkait pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi dan investasi, serta temuan kuantitatif yang menggambarkan tren belanja pemerintah Indonesia dari tahun 2020 hingga 2023. Berkaitan dengan data kuantitatif Tabel 2 analisis belanja pemerintah Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2022, baik pada komponen belanja modal maupun belanja selain modal. Belanja modal mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, peralatan dan mesin, serta tanah dan bangunan, yang semuanya merupakan bentuk investasi jangka panjang. Pada tahun 2022, belanja modal mencapai puncaknya sebesar Rp 233,8 triliun. Di sisi lain, belanja selain modal, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, serta belanja sosial, menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp 1.656,6 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 2.246,5 triliun pada tahun 2023. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Secara teoretis, Galí et al., (2004) menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam bentuk peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap output. Namun, Galí et al., (2004) mengemukakan bahwa respons konsumsi dan investasi terhadap kebijakan tersebut tidak seragam, tergantung pada persepsi masyarakat dan mekanisme crowding-out terhadap investasi swasta. Tagkalakis (2008) menemukan bahwa konsumsi meningkat saat terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah, hasil ini tidak sesuai dengan prediksi model RBC yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berdampak signifikan terhadap konsumsi. Namun, pengaruh terhadap investasi cenderung lemah. Sebaliknya, Edelberg et al, (1998) dan Burnside et al., (2004) menyatakan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan investasi dan tenaga kerja, meskipun konsumsi

masyarakat justru menurun. Temuan tersebut mendukung kerangka RBC, yang memandang fluktuasi ekonomi sebagai respons terhadap shock produktivitas dan bukan akibat langsung dari intervensi fiskal.

Pembahasan

Temuan empiris di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan pengeluaran pemerintah Indonesia selama periode 2020 hingga 2023 mencerminkan upaya sistematis untuk menanggulangi tekanan ekonomi akibat pandemi serta mendorong pertumbuhan jangka menengah. Dalam perspektif teori Keynesian, peningkatan belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong permintaan agregat, dan meningkatkan output nasional. Belanja selain modal seperti subsidi, program sosial, dan belanja pegawai berfungsi menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas sosial-ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ekspansif dalam bentuk peningkatan belanja dianggap efektif dalam memperkuat perekonomian nasional selama masa krisis.

Kesesuaian antara data empiris dan pendekatan Keynesian sudah sesuai. Pemerintah melakukan peningkatan belanja publik secara signifikan terutama pada tahun 2021 dan 2022 sebagai upaya untuk mengatasi pelemahan ekonomi. Respons ini sejalan dengan pandangan Keynesian yang menganggap bahwa intervensi pemerintah sangat penting dalam mendorong pemulihan ekonomi ketika sektor swasta mengalami kontraksi. Belanja publik diarahkan tidak hanya untuk mendukung konsumsi masyarakat melalui subsidi dan bantuan sosial, tetapi juga untuk meningkatkan investasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur.

Namun demikian, jika dianalisis melalui pendekatan RBC, efektivitas pengeluaran pemerintah dalam memengaruhi konsumsi dan investasi tidak selalu signifikan. RBC menekankan bahwa fluktuasi ekonomi adalah akibat dari perubahan produktivitas atau *shock* eksternal seperti pandemi, bukan karena kebijakan fiskal. Oleh sebab itu, meskipun belanja pemerintah meningkat, RBC memandang bahwa konsumsi bisa saja menurun karena masyarakat mengantisipasi pajak yang lebih tinggi di masa depan atau merespons perubahan produktivitas dengan mengurangi konsumsi saat ini. Hal ini konsisten dengan temuan Edelberg et al, (1998) dan Burnside et al., (2004) yang menemukan penurunan konsumsi sebagai respons terhadap peningkatan belanja pemerintah.

Penurunan belanja modal pada tahun 2023 setelah mengalami puncaknya di tahun 2022 dapat ditafsirkan sebagai bentuk penyesuaian pasca-krisis atau keterbatasan fiskal. Dalam pandangan RBC, hal ini adalah respons terhadap dinamika produktivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Meskipun belanja selain modal meningkat signifikan, RBC akan memandang bahwa hal tersebut tidak akan menghalangi fluktuasi ekonomi yang terjadi secara alami akibat faktor produktivitas.

Dengan demikian, baik teori Keynesian maupun RBC memberikan interpretasi yang berbeda terhadap pola belanja pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 2020–2023.

Data menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif diterapkan secara aktif selama masa krisis, namun efektivitasnya terhadap konsumsi dan investasi tergantung

pada pendekatan teoritis yang digunakan. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pendekatan Keynesian tampak lebih jelas dalam menjelaskan peran belanja publik, meskipun perspektif RBC tetap penting untuk memahami keterbatasan struktural dari intervensi pemerintah dalam jangka panjang.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika kondisi perekonomian tidak stabil. Instrumen dari kebijakan fiskal terdiri dari instrumen pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak. Dalam konsep model Keynes, peningkatan pengeluaran pemerintah akan memiliki efek langsung terhadap pendapatan nasional dengan besaran sesuai dengan nilai multiplier pengeluaran pemerintah yang tergantung dari besaran mpc . Peningkatan pengeluaran pemerintah pada model Keynes berpengaruh terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat. Sementara itu, pengaruh dari kenaikan pengeluaran pemerintah terhadap investasi dapat terjadi ataupun tidak. Lain halnya dengan model RBC, peningkatan pengeluaran pemerintah justru akan menurunkan konsumsi masyarakat karena adanya persepsi bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah, semakin besar pula mereka harus membayar pajak, sehingga mereka mengurangi konsumsinya. Implikasinya, waktu kerja mereka akan bertambah, jumlah tenaga kerja akan banyak, investasi akan meningkat, sehingga output yang dihasilkan akan lebih tinggi lagi. Hasil kajian beberapa penulis, pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap pengeluaran pemerintah tampaknya tergantung dari model apa yang digunakan dan cara pandang para peneliti tersebut. Cara pandang manusia dan ilmu pengetahuan selalu berubah, sehingga tidak tak mungkin kalau suatu hari pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap konsumsi dan investasi akan berbeda lagi. Namun demikian, satu hal yang pasti adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan perlu untuk memperhatikan model apa yang akan diambilnya dalam mengkaji dampak dari kebijakan yang dilakukannya, sehingga tidak akan salah dalam memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat di negaranya.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah merancang kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan pendekatan teoritis yang sesuai dengan kondisi ekonomi, seperti pendekatan Keynesian saat krisis dan RBC untuk pembangunan jangka panjang. Selain itu, perlu ada keseimbangan antara belanja modal dan belanja sosial guna mendorong konsumsi dan investasi secara simultan. Penelitian lanjutan diharapkan menggunakan metode analisis yang lebih mendalam dan memperluas cakupan data agar hasilnya lebih komprehensif dan aplikatif bagi perumusan kebijakan

Referensi

- Agnello, L., Furceri, D., & Sousa, R. M. (2013). *How best to measure discretionary fiscal policy? Assessing its impact on private spending. Economic Modelling, 34*, 15–24. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.10.020>
- Alcántar-Toledo, J., & Venieris, Y. P. (2014). *Fiscal policy, growth, income distribution and sociopolitical instability. European Journal of Political Economy, 34*, 315–331. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2014.03.002>
- Aruan, N.I.M., Hutagalung, I, & Purba, B. (2023). Analisis Dampak Teori Keynes dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi, 1*(1), 1-7.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Financial Statistics Of Provincial Government Badan Pusat Statistik BPS-Statistics Indonesia*.
- Burnside, C., Eichenbaum, M., & Fisher, J. D. M. (2004). Fiscal shocks and their consequences. *Journal of Economic Theory, 115*(1), 89–117. [https://doi.org/10.1016/S0022-0531\(03\)00252-7](https://doi.org/10.1016/S0022-0531(03)00252-7)
- Dornbusch, R., Fisher, S., & Startz, R. (2001). *Makroekonomi*. McGraw Hill.
- Edelberg Martin Eichenbaum Jonas Fisher, W. D. (1998). *Understanding the Effects of a Shock to Government Purchases*.
- Galí, J., David LOpez-Salido, J., & Valles, J. (2004). *Understanding The Effects of Government Spending on Consumption International Research Forum on Monetary Policy*. <http://www.ecb.int>
- Gondor, M., & Ozpençe, O. (2014). An Empirical Study on Fiscal Policy in Crises Time: Evidence from Romania and Turkey. *Procedia Economics and Finance, 15*, 975–984. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00657-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00657-1)
- Hadiyanto, A., Susanti, S., & Nugroho, A. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah dalam Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Barat dan Timur. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, 2*(1), 1-15.
- Indrawati, S.M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia’s fiscal policy in the aftermath of the pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 60*(1), 1–33.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Data APBD Murni/Perubahan, realisasi APBD*.
- Ridhwan, M.M., Rezki, J.F., Suryahadi, A., & Ramayandi, A. (2021). A The Impact of Covid-19 Lockdowns on Household Income, Consumption, and Expectation: Evidence from High. Working Paper, 07, 1-29. <https://publication-bi.org/repec/idn/wpaper/WP072021.pdf>
- Tagkalakis, A. (2008). *The effects of fiscal policy on consumption in recessions and expansions. Journal of Public Economics, 92*(5–6), 1486–1508. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.11.007>
- Worldbank. (2020). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending Better Results*. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/611541588612447572/pdf/MainReport.pdf>